

Turnitin Originality Report

article 3 by Article 3

From Quick Submit (Quick Submit)



- Processed on 03-Sep-2019 11:59 WIB
- ID: 1166512618
- Word Count: 6041

Similarity Index

10%

Similarity by Source

Internet Sources:

9%

Publications:

2%

Student Papers:

N/A

sources:

- 1 7% match (Internet from 02-Sep-2019)
<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/939>
- 2 1% match (Internet from 18-Mar-2019)
<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/843/pdf>
- 3 1% match (Internet from 19-Mar-2019)
<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/349/434>
- 4 < 1% match (Internet from 30-Jun-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/76139-ID-anteseden-dan-konsekuensi-keberhasilan-i.pdf>
- 5 < 1% match (Internet from 11-May-2019)
http://jayapura.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/1-Tulisan-Hukum_Pengelolaan-BMD_Penggunaan-BMD .pdf
- 6 < 1% match (publications)
[Nazarudin Nazarudin, Joko Suseno. "Pengaruh PSAK 50/55 \(Revisi 2014\) Berbasis IFRS dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2017](#)
- 7 < 1% match (Internet from 15-Aug-2018)
<http://eprints.unpam.ac.id/1957/>

paper text:

1 DETERMINAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH Dwi Ratmono Ana Rochmawati

Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, Semarang 50275 surel: dwi_ratmono

3@yahoo.com <http://dx.doi.org/10.18202/jamal>. 2018.04.9014 **Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 9 Nomor 2 Halaman 236-247 Malang, Agustus 2018 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879 Tanggal Masuk: 08 April 2018 Tanggal Revisi: 19 Agustus 2018 Tanggal Diterima:**

31 Agustus 2018

1 Abstrak: Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerin- tah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan optimalisasi penggunaan aset tetap Pemerintah Daerah pada Pemerin- tah Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) pada 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Semarang. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan kebutuhan dan inventa- risasi merupakan faktor terpenting dalam optimalisasi aset tetap. Opti- malisasi aset tetap hanya dapat tercapai jika dimulai dengan perenca- naan strategi yang tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, inventarisasi wajib dilakukan agar Pemda mempunyai pangkalan data terkini terkait aset-asetnya. **Abstract: Determinants of Optimizing the Use of Local Government Fixed Assets. This study aims to analyze the optimal determinants of the use of fixed assets of the Regional Government in the Semarang District Government. This study uses the analysis method of Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) in 46 Regional Government. This study finds that demand planning and inventory are the most important factors in fixed assets optimization. It can only be achieved if starts with the right strategic planning and in accordance with the goals of the orga- nization. In addition, the inventory must be carried out so that the regional government has the latest database of its assets. Kata kunci: aset tetap, perencanaan, inventarisasi, penilaian**

Terdapat berbagai permasalahan da- lam pengelolaan aset tetap sebagaimana temuan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) antara lain ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tidak sinkronnya antara visi misi daerah dengan pengadaaan aset tetap, fraud, rendahnya anggaran infrastruktur, masih belum optimalnya penyediaan, dan rendahnya kontribusi aset tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Temuan BPK menunjukkan kelemahan yang terjadi pada hampir seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah dalam pengelolaan aset tetap (Kurniati, Asmony, & Santoso, 2017; Prabowo, Leung, & Guthrie, 2017; Randa & Daromes, 2014). Berbagai permasalahan dalam manajemen aset Pemda tersebut menyebabkan perlunya studi empiris untuk dapat disusun model optimalisasi pengelolaan aset tetap entitas Pemerintah sehingga sesuai dengan tujuan awal penggunaan konsep performance-based budgeting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Atmo, Duffield, Zhang, & Wilson, 2017; Brinkerhoff & Wetterberg, 2013). Penelitian tentang model determinan atau faktor-faktor penentu tingkat optimalisasi aset tetap juga diperlukan karena bukti empiris penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Abdullah, Razak, & Pakir (2011) memberikan bukti empiris bahwa inventarisasi, penilaian, monitoring, serta pengendalian mempunyai dampak positif pada optimalisasi aset. Sementara itu, temuan Nasution, Nasution, & Absah (2015) menunjukkan hasil bahwa hanya faktor inventarisasi yang berperan 236 sebagai determinan optimalisasi aset tetap Pemda. Penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya antara lain Hanis, Trigunaryah, & Susilawati (2011) yaitu inventarisasi dan penilaian aset tidak mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi aset. Temuan Vermeer, Patton, & Styles (2011), Rymarzak & Trojanowski (2015), dan Hasihara (2012) menunjukkan faktor penilaian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat optimalisasi penggunaan aset tetap Pemda. Ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penelitian terdahulu belum didasarkan pada teori institusional yang merupakan salah satu teori penting untuk menjelaskan kepatuhan terhadap regulasi bagi organisasi pemerintah. Dalam hal ini teori institusional dapat menjelaskan tingkat kepatuhan Pemda dalam rangka memperoleh dan menjaga legitimasi dari Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lainnya (Puttick, 2017). Dalam rangka mempertahankan legitimasi institusionalnya, Pemda harus melakukan isomorfisme terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah (Doherty, McConnell, Ellis-Chadwick, 2013). Kedua, penelitian terdahulu belum merujuk pada peraturan perundangan terkini yang mengatur pengelolaan aset tetap Pemda. Regulasi terkini mengatur secara rinci hal-hal yang harus dipatuhi Pemda mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring penggunaan aset tetap oleh Pemda (Hormati, 2012; Johnson, 2012). Oleh karena itu, regulasi tersebut sangat penting dirujuk sebagai kerangka berpikir penelitian dalam merumuskan variabel-variabel yang diduga menjadi determinan tingkat optimalisasi penggunaan aset tetap Pemda. Penelitian ini penting dengan merujuk pada teori institusional dan ketentuan terkini dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga diharapkan dapat mengatasi kelemahan penelitian sebelumnya. Dengan merujuk pada teori institusional dan regulasi terkini, penelitian ini mengembangkan model dengan determinan berupa variabel-variabel yang meliputi proses manajemen aset yang seharusnya dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan aset oleh setiap elemen entitas Pemda. Temuan BPK tentang belum optimalnya penggunaan aset tetap Pemda dan belum konsistennya temuan penelitian terdahulu merupakan fokus masalah penelitian. Studi ini bertujuan menguji pengaruh elemen-elemen atau faktor-faktor dalam manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap dengan menggunakan kerangka teori institusional. Kebaruan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

4 **Dalam rangka menjelaskan ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu, maka penelitian**

menambahkan beberapa elemen dalam manajemen aset yang terkait optimalisasi aset tetap agar lebih

relevan dengan kondisi saat ini terutama dengan merujuk ketentuan terkini yaitu

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Teori new institutional sociology ber- dasarkan

4 pemikiran DiMaggio & Powell (1983) bahwa organisasi dibentuk oleh kon- teks institusional yang ada di

sekitarnya. Pemikiran atau gagasan yang berpengaruh diinstitutionalkan kemudian dilegitima- si secara sah serta diterima sebagai cara operasional organisasi tersebut. Proses le- gitimasi dilakukan oleh organisasi karena tekanan–tekanan lingkungan institusional. Teori ini menegaskan bahwa organisasi ha- nya sebagai simbol dan ritual. Paradigma norma-norma dan legitimasi merupakan kekhususan dari teori institusional. Mereka bergumen bahwa organisasi terbentuk dise- babkan

4 oleh kekuatan dari luar organisasi melalui proses peniruan atau **ketaatan.**

Or- ganisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri atau isomorfisme (proses menjadi sama bentuk) akibat tekanan dari luar. Tiga pros- es bagaimana organisasi melakukan iso- morfisme meliputi paksaan (coercive isomor- phism), peniruan (mimetic isomorphism), dan normatif (normative isomorphism) (Pilcher, 2011; Zhang & Hu, 2017). Coercive isomor- phism terjadi ketika organisasi melakukan adaptasi karena tekanan- tekanan negara, organisasi lain, atau publik. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh faktor regulasi, politis, dan masalah legitimasi (Brookes & Altinay, 2017). Sebagai contoh adalah pe- ngaruh ketentuan yang berimplikasi den- da jika organisasi melanggarnya. Mimetic isomorphism merupakan imitasi sebuah organisasi yang

6 meniru organisasi lain yang dianggap berhasil dalam satu bidang

(Den- man & James, 2016). Normative isomorphism terjadi karena adanya tuntutan profesional. Normative isomorphism disebabkan oleh

6 tekanan normatif yang muncul di bidang

ter- tentu (Joo, Larkin, & Walker, 2017). Faktor nilai atau cara beroperasi organisasi yang dinilai tepat bagi organisasi dapat berasal dari lingkungan akademis dan profesional. Pada saat nilai akademis dan profesional bertambah tekanan normatif itu juga akan bertambah bagi organisasi tersebut (Phelps, 2011; Vendramini, Lecci, & Filannino, 2014). Berdasarkan teori institusional penelitian ini menduga bahwa Pemda harus menye- suaikan diri (isomorphism) atas perubah- an peraturan tersebut untuk menghindari sanksi (coercive isomorphism) dan demi men- jaga citra serta legitimasi organisasinya. Penelitian ini

menambahkan variabel determinan yaitu perencanaan kebutuhan, sumber daya manusia, dan sistem informasi aset (SIPKD-Aset), di mana faktor-faktor tersebut merupakan elemen–elemen pada manajemen aset yang berkaitan dengan keberhasilan optimalisasi aset tetap. Penelitian ini berargumen bahwa determinan tingkat optimalisasi aset tetap meliputi variabel perencanaan, inventarisasi, penilaian, pengawasan, kualitas SDM, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah-Aset (SIPKD). Berdasar teori institusional Pemda akan melakukan normative isomorphism dan coercive-isomorphism terhadap faktor-faktor determinan tersebut dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan aset tetapnya. Kebaharuan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia adalah penambahan tiga variabel determinan tingkat optimalisasi aset tetap yaitu perencanaan kebutuhan, kualitas SDM pejabat pengelola aset tetap, dan penggunaan sistem informasi aset. Penelitian ini menambahkan ketiga variabel tersebut berdasarkan teori institusional dan terbitnya regulasi terkini tentang pengelolaan aset tetap yang dapat menjadi pendorong terjadinya isomorfisme. Penelitian ini penting karena bukti empiris yang disajikan dapat menjadi masukan bagi Pemda dan regulator (khususnya Kementerian Dalam Negeri) tentang upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat optimalisasi penggunaan aset tetap Pemda. Penelitian ini juga penting karena diharapkan dapat menjelaskan ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu dengan menambahkan tiga variabel seperti diuraikan di atas sehingga model penelitian menjadi lebih komprehensif. METODE Populasi penelitian merupakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Semarang. Target populasi adalah 46 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang meliputi Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan. Penelitian ini menggunakan teknik sensus dengan mengambil semua populasi sebagai sampel. Pemerintah Kabupaten Semarang dipilih sebagai objek penelitian karena sebagaimana temuan BPK, Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang cukup banyak terjadi kelemahan pengendalian internal. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah optimalisasi aset tetap (OAT). Definisi operasional optimalisasi aset tetap pada perangkat daerah yaitu suatu proses atau perbuatan menjadikan aset tetap menjadi terbaik dalam peruntukannya bagi operasional entitas. Variabel bebas ada 6 yaitu perencanaan, inventarisasi, penilaian, pengawasan, kualitas SDM, dan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah-Aset (SIPKD). Definisi operasional perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan aset tetap untuk jangka pendek dan jangka panjang. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan aset. Penilaian adalah pengukuran nilai aset tetap pada posisi tanggal tertentu. Pengawasan merupakan kegiatan memastikan pengelolaan aset sudah sesuai dengan peraturan perundang–undangan, sedangkan pengendalian merupakan kegiatan untuk mengevaluasi agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kualitas sumber daya manusia diartikan sebagai kapasitas dan kompetensi pegawai yang diperoleh melalui pendidikan formal, jumlah pelatihan yang pernah diikuti, serta pengalaman dalam bekerja yang digunakan untuk menunjang pekerjaannya. Definisi operasional SIPKD-Aset sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah. Penelitian ini menggunakan metode survei karena data yang digunakan berupa

7 data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei kuesioner. Teknik analisis data

yang digunakan adalah model persamaan struktural berbasis varian atau dikenal dengan SEM-PLS dengan bantuan aplikasi Warp-PLS 5.0. Alasan pemilihan SEM-PLS sebagai teknik analisis data karena model yang dibangun dan dikembangkan pada penelitian ini menggunakan variabel laten. Selain itu, SEM-PLS dapat digunakan untuk semua jenis skala pengukuran variabel. HASIL DAN PEMBAHASAN Data

dikumpulkan dengan survei kuesioner disebarkan dengan cara mengirimkan langsung kuesioner kepada OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Semarang sejumlah 138 buah kuesioner, dengan rincian setiap OPD diberi 3 kuesioner yang ditujukan kepada 1 kuesioner untuk Pengguna Barang, 1 kuesioner untuk Penyimpan Barang, dan 1 kuesioner untuk Pengurus Barang. Kuesioner diberikan kepada ketiga jabatan tersebut karena dianggap sebagai pihak yang dapat memberikan informasi terkait pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah. Ringkasan hasil survei dalam penelitian ini disajikan di Tabel 1. Deskripsi demografi responden disajikan di Tabel 2. Profil responden yang dianalisis meliputi tingkat pendidikan, masa kerja, lama menduduki jabatan dalam pengelolaan barang milik daerah dan jumlah pelatihan yang pernah diikuti selama menjabat di bidang tersebut. Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, dapat dianalisis profil responden penelitian ini. Tingkat pendidikan responden cenderung bervariasi, tetapi proporsi terbesar adalah memiliki pendidikan S1. Dilihat dari masa kerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, sebagian besar pendidikan memiliki pengalaman kerja yang memadai dengan hanya 16,67% responden yang memiliki masa kerja kurang dari 10 tahun. Sementara itu, untuk pengalaman kerja menduduki jabatan di bidang pengelolaan barang milik daerah, sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja lebih dari satu tahun. Namun, responden kurang mengikuti pelatihan di bidang aset tetap ditunjukkan dengan 36,36% tidak pernah mengikuti dan 59,09% mengikuti pelatihan di bawah 10 kali selama menduduki jabatan sebagai pengelola aset tetap di organisasinya. Hanya 4,55% responden yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan aset Pemda lebih dari 10 kali selama bertugas dalam bidang manajemen aset Pemda. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai, sebagian besar responden kurang dalam mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan aset tetap. Padahal, pelatihan, terutama terkait teknis operasional pengelolaan aset tetap sesuai regulasi terkini, sangat diperlukan dalam upaya peningkatan optimalisasi penggunaan aset tetap Pemda. Populasi pada penelitian ini adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang sejumlah 46 dengan target sasaran tiga orang responden yaitu Pengguna Barang, Penyimpan Barang, dan Pengurus Barang, sehingga data yang diolah dalam penelitian ini merupakan skor rata-rata (mean) untuk setiap unit analisis yaitu nilai rata-rata jawaban dari pengguna barang, penyimpanan barang, dan pengurus barang pada inspeksi perangkat daerah. Penggunaan tiga orang responden tersebut bertujuan agar jawaban mereka dapat merepresentasikan praktik pengelolaan aset tetap pada organisasinya dibandingkan dengan hanya menggunakan satu orang responden. Statistik deskriptif variabel ditampilkan dalam Tabel 3. Tingkat optimalisasi aset tetap (OAT) diukur dengan 5 indikator. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat kisaran jawaban responden (aktual) sebesar 10,00 hingga 23,35, dengan kisaran teoritisnya 5 hingga 25. Mean aktual optimalisasi aset tetap adalah sebesar 19,51 yang lebih besar dibandingkan dengan mean teoritis, yaitu 15. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat optimalisasi aset tetap OPD yang menjadi sampel pada penelitian ini dipersepsikan relatif tinggi atau cukup memadai. Variabel perencanaan memiliki nilai mean aktual variabel ini sebesar 20,27 lebih besar dibandingkan dengan nilai tengah/mean teoritisnya yaitu 15. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan kebutuhan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai yang relatif tinggi. Dengan kata lain, perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang telah dilaksanakan dengan baik. Variabel inventarisasi (I) memiliki nilai Tabel 1. Ringkasan Hasil Survei Keterangan Jumlah Jumlah kuesioner yang dikirimkan (46 OPD X 3 target responden) 138 buah Jumlah kuesioner yang kembali 132 buah Jumlah kuesioner yang dapat digunakan 132 buah Tingkat kuesioner kembali yang dapat digunakan (usable response rate) 95,65% Tabel 2. Demografi Responden Uraian Kategori Jumlah Persentase Tingkat Pendidikan SMA Diploma S1 S2 Masa Kerja 0 s.d 10 Tahun 11 s.d 20 Tahun 21 s.d 30 Tahun > 30 tahun Lama menduduki jabatan dalam pengelolaan BMD < 1 tahun 1 s.d 10 tahun > 10 tahun Jumlah pelatihan BMD yang pernah diikuti Tidak pernah 1 s.d 10 kali > 10 kali 39 29,55% 19 14,39% 46 34,85% 28 21,21% 22 16,67% 54 40,91% 30 22,73% 26 19,70% 17 12,88% 105 79,55% 10

7,58% 48 36,36% 78 59,09% 6 4,55% mean aktual variabel ini sebesar 20,07 lebih besar dibandingkan dengan mean teoritisnya yaitu 15. Hasil ini mengindikasikan inventarisasi mempunyai nilai yang relatif tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa inventarisasi barang milik daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang telah dilaksanakan dengan baik. Variabel penilaian (P) memiliki nilai mean aktual variabel ini sebesar 21,37 lebih besar dibandingkan dengan mean teoritisnya. Penilaian aset telah dilakukan dengan baik. Variabel pengawasan dan pengendalian (PP) dalam penelitian ini memiliki nilai mean aktual variabel ini sebesar 21,62 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean teoritisnya yaitu 18. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan dan pengendalian barang milik daerah memiliki nilai yang relatif tinggi. Variabel kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penelitian ini memiliki nilai mean aktual variabel ini sebesar 14,93 Tabel 3. Statistik Deskriptif lebih besar dibandingkan dengan mean teoritisnya, yaitu 12. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Dengan kata lain, SDM pegawai yang menangani pengelolaan aset tetap telah berkemampuan baik. Variabel SIPKD memiliki nilai mean aktual lebih tinggi dari mean teoritisnya, di mana mean aktual sebesar 17,64 dan mean teoritisnya sebesar 15. Hal ini menunjukkan bahwa SIPKD sudah diterapkan cukup baik. Evaluasi kriteria reliabilitas ditunjukkan dalam Tabel 4. Pada Tabel 4 tampak bahwa semua variabel memiliki cronbach's alpha dan composite reliability di atas 0,70 sehingga bisa disimpulkan bahwa pengukuran memenuhi syarat reliabilitas. Hal ini menunjukkan kriteria konsistensi indikator-indikator pengukuran variabel laten telah terpenuhi. Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat parameter loading factor dan Variabel Nilai Teoritis Nilai Aktual Mean Rata-Rata Mean Rata-Rata Std dev Optimalisasi aset tetap Perencanaan Inventarisasi Penilaian Pengawasan Kualitas SDM SIPKD-aset 5 25 15 10 5 25 15 11 5 25 15 12,3 5 25 15 15,7 6 30 18 15 4 20 12 10 5 25 15 5 23,35 19,51 2,6 24,01 20,27 2,2 25 20,07 2,66 25 21,37 2,03 28,66 21,62 3,23 19,33 14,93 2,13 22,67 17,64 3,55 Tabel 4. Hasil Uji Construct Reliability Variabel Cronbach Alpha Composite Reliability Optimalisasi Aset Tetap 0,861 0,903 Perencanaan Kebutuhan 0,889 0,919 Inventarisasi 0,86 0,9 Penilaian 0,876 0,912 Pengawasan 0,847 0,888 Sumber Daya Manusia 0,752 0,844 SIPKD-Aset 0,958 0,967 Average Variance Extracted (AVE). Berdasarkan pertimbangan bahwa indikator-indikator konstruk penelitian ini merupakan tahap awal pengembangan instrumen, maka digunakan kriteria loading factor 0,5 - 0,6 untuk mengukur validitas konvergen (Latan & Ghozali, 2016). Sementara itu, untuk konstruk SIPKD-Aset (SA) menggunakan kriteria loading factor > 0,7 karena bersifat confirmatory. Nilai loading factor dari masing-masing variabel laten pada Tabel 5. Dari Tabel 5 seluruh indikator konstruk dalam penelitian telah sesuai dengan kriteria validitas konvergen yaitu minimum 0,5. Pengujian validitas konvergen secara keseluruhan juga dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE). Konstruk dikatakan memenuhi kriteria validitas konvergen jika nilai AVE berada di atas 0,5. Berdasarkan hasil Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat validitas konvergen. Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan melihat output discriminant validity. Latan & Ghozali (2016) menyatakan bahwa jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dari nilai korelasi antarkonstruk, maka dinyatakan memenuhi kriteria uji validitas diskriminan. Dari Tabel 7 dapat terlihat bahwa model telah memenuhi validitas diskriminan. Secara keseluruhan hasil pengujian menunjukkan kriteria validitas dan reliabilitas dalam tahap outer model telah terpenuhi sehingga analisis dapat dilanjutkan pada tahap inner model. Hasil pengujian pada inner model merupakan dasar untuk menyimpulkan variabel-variabel apa yang secara empiris terbukti menjadi determinan tingkat optimalisasi penggunaan aset tetap Pemda. Pengujian dilakukan dengan melihat hasil evaluasi model struktural (inner model). Hasil evaluasi terhadap pengujian model struktural dengan software WarpPLS 5.0 disajikan pada Gambar 1. Hasil pengujian SEM-PLS diringkas pada Tabel 8. Evaluasi terhadap hasil pengujian meliputi p-values dan path coefficients apakah sesuai dengan yang diduga menurut teori. Dari Tabel 8 terlihat bahwa terdapat dua variabel yaitu Perencanaan dan Inventarisasi yang menghasilkan p-values < 0,05 dan path coefficient bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa

argumen yang dibangun untuk kedua variabel tersebut didukung oleh bukti empiris. Sementara itu, 4 hubungan variabel-nya pada penelitian ini menghasilkan p-values di atas $> 0,05$, yang menandakan bahwa argumen yang dibangun berdasarkan hubungan variabel tersebut tidak didukung. Pengujian statistik menunjukkan hasil bahwa perencanaan kebutuhan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Hasil ini juga diperkuat dengan statistik deskriptif variabel yaitu Tabel 5. Hasil Validitas Konvergen: Kisaran Loading Factor Variabel Kisaran Loading Factor Optimalisasi Aset Tetap 0,534 - 0,897 Perencanaan Kebutuhan 0,811 - 0,878 Inventarisasi 0,741 - 0,870 Pengawasan dan Pengendalian 0,636 - 0,904 Sumber Daya Manusia 0,612 - 0,889 SIPKD-Aset 0,892 - 0,960 Tabel 6. Hasil Validitas Konvergen: Average Variance Extracted (AVE) Variabel Nilai AVE Perencanaan Kebutuhan (PK) 0,693 Inventarisasi (I) 0,643 Pengawasan dan Pengendalian (P) 0,677 Pengawasan dan Pengendalian (PP) 0,574 Sumber Daya Manusia (SDM) 0,578 SIPKD-Aset (SA) 0,856 Optimalisasi Aset Tetap (OAT) 0,657 mean aktual variabel perencanaan kebutuhan menunjukkan nilai sebesar 20,27 jauh lebih tinggi daripada mean teoritisnya yaitu sebesar 15. Nilai indeks jawaban responden pada semua indikator variabel perencanaan kebutuhan menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan kebutuhan pada perangkat daerah sudah sesuai dengan rencana kerja instansi. Temuan ini sejalan dengan teori new institutional sociology, bahwa organisasi dapat melakukan coercive isomorphism karena tekanan dari luar organisasi, dapat berasal dari organisasi lain, negara, ataupun dari masyarakat. Dalam hal ini instansi perangkat daerah melakukan coercive isomorphism, di mana perangkat daerah melaksanakan perencanaan kebutuhan barang milik daerah karena tekanan dari pemerintah pusat melalui diterbitkannya regulasi tentang aset Pemda. Langkah instansi perangkat daerah melakukan coercive isomorphism, menghindarkan perangkat daerah dari sanksi dan juga citra instansi terjaga karena instansi mematuhi peraturan pemerintah pusat. Di samping itu, pemenuhan terhadap peraturan tersebut, khususnya dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah, diketahui dari hasil penelitian bahwa perencanaan kebutuhan yang tepat mampu meningkatkan optimalisasi aset tetap pada instansi perangkat daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Priyono (2013) dan Snow & Reck (2016), yang menemukan bahwa analisis kebutuhan (perencanaan kebutuhan) merupakan faktor penting dalam manajemen aset yang salah satu tujuannya agar aset optimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa inventarisasi berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap. Inventarisasi dilaksanakan dengan proses dan sistem database aset tetap secara memadai. Perangkat daerah telah melaksanakan inventarisasi barang milik daerah dengan tertib. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh nilai indeks untuk semua indikator pada variabel inventarisasi nilainya tinggi. Temuan tersebut didukung nilai mean variabel inventarisasi secara aktual lebih besar dibandingkan mean teoritisnya yaitu ($20,07 > 15$). Entitas telah melaksanakan inventarisasi barang milik daerah dengan tertib. Temuan ini sejalan dengan teori new institutional sociology bahwa organisasi melakukan coercive isomorphism karena keharusan atau tekanan dari pemerintah pusat dengan kewajiban menerapkan inventarisasi di mana instansi perangkat daerah berkewajiban melaksanakan inventarisasi. Inventarisasi yang baik dapat menyajikan informasi barang milik daerah (aset tetap) yang lengkap dan up-to-date. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan penerapan inventarisasi yang dilaksanakan sesuai regulasi terbukti mampu meningkatkan optimalisasi aset tetap pada instansi perangkat daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Byrne (2016), Vermeer, Patton, & Styles Tabel 7. Hasil Validitas Diskriminan: Akar Kuadrat Average Variance Extracted (AVE) Variabel OAT PK I P PP SDM SA OAT -0,81 0,801 0,401 0,271 0,298 0,548 0,204 PK 0,801 -0,833 0,298 0,318 0,252 0,542 0,223 I 0,401 0,298 -0,802 0,637 0,648 0,437 0,331 P 0,271 0,318 0,637 -0,823 0,326 0,295 0,361 PP 0,298 0,252 0,648 0,326 -0,758 0,553 0,636 SDM 0,548 0,542 0,437 0,295 0,553 -0,76 0,453 SA 0,204 0,223 0,331 0,361 0,636 0,453 -0,925 PK (R) 5i I (R) 5i $r^2 = 0.29$ $r^2 = 0.62$ $P < 0.02$ $g < .01$ (R) 5i $r^2 = 0.14$ $g < 0.15$ OAT PP $r^2 = 0.02$ (R) 5i (R) 6i $g < 0.45$ $r^2 = 0.17$ $g < 0.12$ $r^2 = 0.14$ $g < 0.17$ SDM (R) 4i SA (R) 5i

Gambar 1. Hasil Uji Model Struktural (2011), Abdullah, Razak, & Pakir (2011), Hasihara (2012), dan

Nasution, Nasution, & Absah (2015). Namun, temuan ini berbe- da dengan penelitian Hanis, Trigunarsyah, & Susilawati (2011) yang menunjukkan bahwa variabel inventarisasi tidak berpe- ngaruh terhadap optimalisasi aset tetap. Dari hasil pengujian disimpulkan bah- wa variabel Penilaian tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap. Coercive isomorphism yang dilakukan oleh instansi perangkat daerah dalam hal kewajiban da- lam menyajikan nilai aset tetap (barang mi- lik daerah) secara tepat dan benar dalam neraca perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak terbuk- ti mampu meningkatkan optimalisasi aset tetap (barang milik daerah) pada instansi perangkat daerah. Tidak adanya pengaruh penilaian terhadap optimalnya aset tetap dapat disebabkan oleh penilaian aset tetap dalam lingkup perangkat daerah hanya se- Tabel 8. Ringkasan Hasil Pengujian batas dalam rangka penyusunan neraca saja sehingga belum sejalan dengan amanat ketentuan barang milik daerah (Zamzami & Faiz, 2015). Temuan penelitian ini berbeda dengan Abdullah, Razak, & Pakir (2011) dan Nasution, Nasution, & Absah (2015). Hasil pengujian menunjukkan bah- wa pengawasan tidak berpengaruh terha- dap optimalisasi aset tetap. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa mean ak- tual pengawasan dan pengendalian (PP) le- bih besar dari mean teoritisnya yaitu $21,62 > 18$. Lebih lanjut dilihat dari nilai indeks jawaban responden untuk keempat indika- tor pengawasan internal berada pada nilai tinggi. Namun, berbeda dengan nilai indeks untuk indikator pengawasan eksternal yang memiliki nilai indeks pada kategori sedang. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian eksternalnya tidak sebaik pengawasan dan pengendalian internalnya. Jika dilihat lebih lanjut pada Pengaruh Path P- Coefficients

Values Kesimpulan Pe re ncanaan ? Optimalisasi Aset T e tap 0,62 <0,001 Diterima Inventarisasi ? Optimalisasi Aset T e tap 0,29 0,016 Diterima Pe ni lai an ? Optimalisasi Aset T e tap 0,143 0,155 Di tolak Pe ngawasan ? Optimalisasi Aset T e tap 0,017 0,453 Di tolak Kualitas SDM ? Optimalisasi Aset T e tap 0,166 0,117 Di tolak SIPKD-Aset ? Optimalisasi Aset T e tap 0,135 0,169 Di tolak statistik deskriptif bahwa pengawasan dan pengendalian eksternal untuk instansi kecil (kecamatan) masih lemah jika dibandingkan dengan instansi besar. Hal ini diketahui dari nilai mean aktual indikator pada instansi ke- cil di bawah mean teoritisnya. Hal ini dapat diartikan bahwa instansi kecil (kecamatan) masih jarang mendapatkan pengawasan eksternal baik dari pengelola barang mau- pun pemeriksa eksternal seperti BPK sehing- ga dapat dimungkinkan hal ini yang menye- babkan tidak berpengaruhnya determinan tersebut. Hasil ini tidak konsisten dengan Hanis, Trigunarsyah, & Susilawati (2011), Vermeer, Patton, & Styles (2011), Rymarzak & Trojanowski (2015), Abdullah, Razak, & Pakir (2011), dan Hasihara (2012) yang me- nemukan bahwa variabel pengawasan ber- pengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap. Bukti empiris penelitian ini adalah vari- abel kualitas SDM tidak berdampak positif terhadap optimalisasi aset tetap. Meskipun kualitas SDM dipersepsikan cukup baik se- bagaimana tercermin dari jawaban respon- den, analisis terhadap statistik deskriptif menunjukkan kompetensi SDM yang spe- sifik sesuai bidang pengelolaan aset belum cukup memadai. Hal ini tercermin pada indikator kedua yang menunjukkan nilai indeks pada kategori sedang, yang artinya kualifikasi pendidikan sumber daya manu- sia yang menangani manajemen aset belum sepenuhnya sesuai dengan bidang tugasnya. Kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugas menyebabkan pega- wai kurang cakap dalam optimalisasi aset tetap (barang milik daerah). Selain itu, jika dilihat lebih jauh dari Tabel 3 pada statis- tik deskriptif variabel kualitas SDM diketa- hui bahwa sebagian besar pengguna ba- rang (kepala/pimpinan perangkat daerah) sebesar 55,81% belum pernah mengikuti pelatihan/workshop/seminar/sosialisasi tentang pengelolaan aset tetap sehingga di- indikasikan bahwa pemahanan dari kepala/ pimpinan perangkat daerah perihal pengelo- laan aset tetap (barang milik daerah) masih kurang. Pimpinan sebagai pemegang kekua- saan atas pengelolaan barang milik daerah semestinya memahami manajemen aset se- hingga pimpinan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengguna ba- rang dengan baik agar aset tetap yang da- lam penguasaannya dapat optimal (Amirya, Djamhuri, & Ludigdo, 2012; Simamora & Halim, 2012). Hal ini dapat menyebabkan normative isomorphism yang dilakukan instansi perangkat daerah belum berhasil (Rasolonjatovo, Lande, & Harison, 2015). Hasil

pengujian statistik pada Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel penggunaan SIPKD tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap. Evaluasi terhadap statistik deskriptif indikator SIPKD nomor 1 dan 5 menunjukkan indeks nilai jawaban responden pada kategori sedang. Indikator nomor 1 menggambarkan lengkap tidaknya informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIPKD, sedangkan indikator nomor 5 menggambarkan cepat tidaknya informasi diperoleh dari SIPKD. Dari nilai indeks indikator SA1 dan SA5 tersebut diambil kesimpulan bahwa SIPKD belum dapat menghasilkan informasi terkait aset tetap secara lengkap dan belum dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam optimalisasi aset tetap dengan cepat, sehingga hal tersebut menyebabkan penggunaan SIPKD belum mampu menunjang optimalisasi aset tetap pada perangkat daerah. Penerapan aplikasi SIPKD belum mampu menghasilkan informasi aset tetap dengan lengkap serta cepat, di mana informasi aset tetap yang lengkap dan cepat sangat diperlukan dalam optimalisasi aset tetap. Oleh karena itu, tekanan pemerintah melalui PP Nomor 56 Tahun 2005 yang mewajibkan penggunaan aplikasi SIPKD, belum mampu meningkatkan optimalisasi aset tetap pada instansi perangkat daerah. Hal tersebut dikarenakan penerapan SIPKD masih sebatas pemenuhan terhadap peraturan saja, di mana SIPKD sudah diterapkan dan belum diarahkan dengan mindset untuk menunjang optimalisasi aset tetap. Temuan ini berbeda dengan Kolinug, Ilat, & Pinatik (2015) dan Lourenco (2015) bahwa teknologi informasi diperlukan dalam pengelolaan aset yang baik untuk mencapai optimalitas aset pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga berimplikasi pentingnya literatur akuntansi sektor publik menekankan aspek perencanaan dan inventarisasi sebagai faktor yang mempunyai dampak positif terhadap tingkat optimalisasi penggunaan aset tetap pemerintah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan relevansi teori institusional khususnya aspek coercive isomorphism berupa regulasi sebagai faktor yang mempengaruhi praktik pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah. Bukti empiris penelitian ini juga menunjukkan relevansi teori institusional tentang normative isomorphism organisasi dalam hal ini pentingnya aspek perencanaan strategis sebelum dilaksanakannya kegiatan pengadaan aset Pemda. Pentingnya aspek perencanaan juga menunjukkan relevansi topik strategic planning and budgeting dalam ilmu akuntansi manajemen dalam rangka peningkatan optimalisasi aset tetap Pemda (Chen & Imam, 2014). Dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan aset tetap harus terdapat keterkaitan logis antara rencana strategis dengan anggaran khususnya belanja modal berupa aset tetap Pemda. Pentingnya inventarisasi aset yang dimiliki Pemda juga berimplikasi pada aspek keperilakuan dalam bidang sektor publik bahwa dengan database aset yang memadai akan dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab bagi pejabat pengelola aset tetap terkait kinerja aset-aset yang ada dalam responsibility center di organisasinya (Sareen, 2017).

3SIMPULAN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor

penentu tingkat optimalisasi aset tetap yaitu perencanaan kebutuhan dan inventarisasi. Kedua faktor tersebut dapat menjadi solusi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya penggunaan aset tetap Pemda. Perencanaan yang tepat terbukti mampu meningkatkan optimalisasi aset tetap. Kemudian sebagian besar perangkat daerah telah melaksanakan inventarisasi dengan baik sehingga mampu meningkatkan optimalisasi aset tetap. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagian besar telah dilaksanakan sesuai rencana kerja (Renja). Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi hasil teoritis yaitu referensi tambahan dan bahan kajian lebih lanjut dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi aset tetap pada pemerintah daerah. Implikasi praktis adalah hasil penelitian ini dapat menjadikan tambahan informasi bagi perangkat daerah pada pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi aset tetap menuju

praktik yang lebih baik. Adanya pengaruh perencanaan kebutuhan terhadap optimalisasi aset tetap menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan yang ditetapkan pada perangkat daerah mampu menjadikan aset tetap pada perangkat daerah optimal. Begitu juga dengan inventarisasi yang ditemukan berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset tetap. Dengan inventarisasi yang baik dapat diperoleh informasi aset tetap yang lengkap dan up-to-date yang sangat dibutuhkan upaya optimalisasi aset tetap. Dengan inventarisasi yang dilakukan secara baik tersebut, Pemda akan memiliki database yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan strategis dan penganggaran kegiatan operasional pada tahun anggaran berikutnya. DAFTAR RUJUKAN

- 1 **Abdullah, S., Razak, A. A., & Pakir, A. H. K.** (2011). The Characteristics of Real Estate Assets Management Practice in the Malaysian Federal Government. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 16-35. <https://doi.org/10.1108/14630011111120323>
- Amirya, M., Djamhuri, A., & Ludigdo, U.** (2014). Pengembangan Sistem Anggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya: Perspektif Institusionalis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 343-356. <http://doi.org/10.18202/jamal.2012.12.7166>
- Atmo, G. U., Duffield, C., Zhang, L., & Wilson, D. I.** (2017). Comparative Performance of PPPs and Traditional Procurement Projects in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 30(2), 118-136. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2016-0047>
- Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A.** (2013). Performance-based Public Management Reforms: Experience and Emerging Lessons from Service Delivery Improvement in Indonesia. *International Review of Administrative Sciences*, 79(3), 433-457. <https://doi.org/10.1177/0020852313491059>
- Brookes, M., & Altinay, L.** (2017).

Knowledge Transfer and Isomorphism in Franchise Networks. *International Journal of Hospitality Management*, 62, 33-42. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.11.012>

- 1 **Byrne, M.** (2016). 'Asset Price Urbanism' and Financialization after the Crisis: Ireland's National Asset Management Agency. *International Journal of Urban and Regional Research*, 40(1), 31-45. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12331>
- Chen, J., & Imam, P.** (2014). Consequences of Asset Shortages in Emerging Markets. *Macroeconomics and Finance*

246

- 2 **Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2018, Hlm**

236-247 in *Emerging Market Economies*, 7(1), 4-35. <https://doi.org/10.1080/17520843.2013.809007>

1Denman, B. D., & James, J. (2016). Cul- tural Ecology and Isomorphism Applied to Educational Planning in China's In- ner Mongolia: A New Rubric. Interna- tional Journal of Comparative Education and Development, 18(1), 40-52. <https://doi.org/10.1108/IJCED-10-2015-0003>

DiMaggio, P. J., & Powell, W.W. (1983). Institutional Isomorphism and Collec- tive Rationality in Organization Fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160.<https://doi.org/10.2307/20-95101>

Doherty, N.. F., McConnell, D. J., & Ellis Chadwick, F. (2013). Institutional Res- ponses to Electronic Procurement in the Public Sector. International Jour- nal of Public Sector Management, 26(6), 495-515. <https://doi.org/10.11-08/IJPSM-04-2012-0048>

Hanis, M. H., Trigunarsyah, B.,& Susila- wati, C. (2011). The Application of Pub- lic Asset Management in Indonesian Lo- cal Government: A Case Study in South Sulawesi Province. Journal of Corpo- rate Real Estate, 13(1), 36-47. <https://doi.org/10.1108/14630011111120332>

Hasiara, L. O. (2012). Sikap dan Perilaku Pejabat, Unit SKPD dalam Pengelolaan APBD dan Aset Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(1), 101-110. <http://doi.org/10.18202/jamal.2012.04.7147>

Hormati, A. (2012). Pengujian Model Uni- fied Theory of Acceptance and Use of Technology dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(1), 1-24. <http://doi.org/10.18202/jamal.2012.04.7140>

Johnson, M. (2012). A study of Emarket Adoption Barriers in the Local Government Sector. Journal of Enter- prise Information Management, 25(6), 509-536, <https://doi.org/10.1108/17-410391211272810>

Joo, S., Larkin, B., & Walker, N. (2017). Institutional Isomorphism and Social Responsibility in Professional Sports. Sport, Business and Management: An In- ternational Journal, 7(1), 38-57. <https://doi.org/10.1108/SBM-03-2016-0010>

Kolinug, M. S., Ilat, V. H., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota To- mohon. Jurnal Emba, 3(1), 818-830. Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B.

(2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu hingga Kini). Jurnal Akun- tansi Multiparadigma, 8(3), 540-558. <http://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072>

1Latan, H., & Ghozali, I. (2016). Partia **Least Squares Konsep, Metode dan** Aplika- si **WarpPLS 5.0. Semarang: BPUNDIP.**

Lourenco, R. P. (2015). An Analysis of Open Government Portals: A Perspective of Transparency for Accountability. Go- vernment Information Quarterly, 32(3), 323-332. <https://doi.org/10.1016/j.gi- q.2015.05.006>

Nasution, E., Nasution, H, & Absah, Y.

(2015). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, 18(1), 15-35 **Phelps, A. (2011). Municipal Property Asset Management – A Comparative Study of UK and Russia. International Journal of Strategic Property Management, 15(4), 416-437. <https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.642537> **Pilcher, R. (2011). Implementing IFRS in Local Government: Institutional Isomorphism as NPM Goes Mad? Local Government Studies, 37(4), 367-389. <https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588702> **Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in Implementation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 29(1), 104-137. <https://doi.org/10.1108/JPB-AFM-29-01-2017-B005> **Priyono, K. (2013). Keandalan Informasi********

Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1-21. <http://doi.org/10.18860/em.v4i1.2331>

1 **Puttick, S. (2017). 'You'll See That Everywhere': Institutional Isomorphism in Secondary School Subject Departments. School Leadership & Management, 37(1-2), 61-79. <https://doi.org/10.1080/13632434.2017.1293633> **Randa, F., & Daromes, F. (2014). Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Multi-paradigma, 5(3), 477-484. <http://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5035> **Rasolonjatovo, H., Lande, E., & Harison, V.******

(2015). Active Asset Management: Feasibility in Malagasy Municipalities. *Public Money & Management*, 35(6), 417-422. <https://doi.org/10.1080/09540962.2015.1083686>

1 **Rymarzak, M., & Trojanowski, D. (2015). Asset Management Determinants of Polish Universities. Journal of Corporate Real Estate, 17(3), 178-197. <https://doi.org/10.1108/JCRE-02-2015-0006> **Sareen, S. (2017). Who Governs Local****

Access in Jharkhand? Mechanisms of Access to Government Services. *Forum for Development Studies*, 44(2), 249-275. <https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1233135>

1 **Simamora, R., & Halim, A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(1), 47-61. <http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v10i1.163> **Snow, N. M., & Reck, J. L. (2016). Developing a Government Reporting Taxonomy. Journal of Information Systems,****

30(2), 49-81. <https://doi.org/10.2308/isys-51373> **Vendramini, E., Lecci, F., & Filannino,**

C. (2014). When the Rubber Meets the Road: Isomorphism, Rhetoric, and (Mis)management of Interinstitutional Performance. *International Journal of Public Administration*, 37(13), 980-986. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.944992>

1**Vermeer, T. E., Patton, T. K., & Styles,** A. K. (2011). Reporting of General Infrastructure Assets under GASB Statement No. 34. *Accounting Horizons*, 25(2), 381-407. <https://doi.org/10.2308/acch-10029> **Zamzami, F., & Faiz, I. (2015).** Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 20-27. <http://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6003> **Zhang, H., & Hu, B. (2017).** *The Effects of*

Organizational Isomorphism on Innovation Performance through Knowledge Search in Industrial Cluster. *Chinese Management Studies*, 11(2), 209-229. <https://doi.org/10.1108/CMS-04-2016-0076> Ratmono, Rochmawati, Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset... 237 238

2**Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2018, Hlm**

236-247 Ratmono, Rochmawati, Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset... 239 240

2**Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2018, Hlm**

236-247 Ratmono, Rochmawati, Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset... 241 242

2**Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2018, Hlm**

236-247 Ratmono, Rochmawati, Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset... 243 244

2**Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2018, Hlm**

236-247 Ratmono, Rochmawati, Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset... 245 Ratmono, Rochmawati, Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset... 247